

Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Muhammad Idris¹ Arismunandar² Ismail Tolla³

Program Studi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Email: idrismuhammad306@gmail.com¹ arismunandar@unm.ac.id² ismail.tolla@unm.ac.id³

Abstract

Education in Indonesia has undergone significant changes throughout its history, influenced by various social, political, and cultural factors in each period. During the colonial era, the education system in Indonesia was designed to maintain colonial power, with a discriminatory structure that provided access to education only for the elite and a small number of indigenous people considered suitable for supporting colonial administration. However, educational figures such as Ki Hajar Dewantara sought to introduce a more inclusive education system based on local culture through the establishment of Taman Siswa. After Indonesia's independence in 1945, the education system faced significant challenges, with the primary focus being on equalizing access to education and shaping the national character that accommodates social and cultural diversity. During the New Order period, the implementation of the nine-year compulsory education policy successfully increased access to education, yet it was still influenced by the goal of political stability and economic development driven by the authoritarian government. Following the 1998 Reformation, Indonesia introduced decentralization policies, granting local governments more autonomy in managing education, although disparities in education quality between urban and rural areas remain a major challenge. Additionally, in the era of globalization, Indonesian education faces new challenges in creating a more inclusive, high-quality, and relevant education system that meets current social and economic needs. Therefore, understanding the evolution of Indonesia's education system is essential not only to identify policy changes but also to explore the role of education in shaping national identity and supporting national development.

Abstrak

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarahnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang ada pada setiap periode. Pada masa kolonial, sistem pendidikan di Indonesia didesain untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, dengan pola yang diskriminatif yang hanya memberikan akses pendidikan kepada golongan elit dan sebagian kecil pribumi yang dianggap memiliki potensi untuk mendukung administrasi kolonial. Namun, tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara berupaya memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dengan berbasis pada budaya lokal melalui pendirian Taman Siswa. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan menghadapi tantangan besar, di mana fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan dan pembentukan karakter bangsa yang mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya. Pada masa Orde Baru, kebijakan wajib belajar sembilan tahun berhasil meningkatkan akses pendidikan, namun tetap dipengaruhi oleh tujuan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang didorong oleh pemerintah otoriter. Dengan Reformasi 1998, Indonesia memperkenalkan kebijakan desentralisasi yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, meskipun ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan besar. Selain itu, dalam era globalisasi, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan baru untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan sosial serta ekonomi masa kini. Oleh karena itu, memahami evolusi sistem pendidikan di Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan dan juga untuk menggali peran pendidikan dalam membentuk identitas nasional serta mendukung pembangunan bangsa.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang ada pada setiap periode. Pada masa penjajahan, pendidikan di Indonesia lebih diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, dengan sistem yang diskriminatif terhadap rakyat pribumi. Hanya golongan tertentu yang diberikan akses pendidikan formal, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk mengakses pendidikan. Pada masa tersebut, pendidikan berfungsi untuk mempertahankan dominasi kolonial dan tidak memperhatikan pemerataan sosial (Suryahadi, Sumarto, & Suharso, 2006). Namun, beberapa tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dengan mendirikan Taman Siswa, yang bertujuan memberikan pendidikan berbasis budaya lokal untuk semua kalangan masyarakat, tanpa terkecuali (Kurniawan & Suwirta, 2016).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar. Pemerintah yang baru merdeka menghadapi tantangan besar dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada pemerataan akses, tetapi juga dalam pembentukan karakter bangsa yang mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya. Kebijakan pendidikan pada masa awal kemerdekaan lebih difokuskan pada penyebaran akses pendidikan yang lebih luas, sekaligus membangun karakter dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang sebelumnya terpinggirkan oleh kebijakan kolonial yang eksklusif. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi serta memperkuat persatuan bangsa (Suryahadi et al., 2006). Di masa Orde Baru (1966–1998), meskipun kebijakan wajib belajar sembilan tahun berhasil meningkatkan akses pendidikan, namun pendidikan tetap sangat dipengaruhi oleh tujuan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang didorong oleh pemerintahan otoriter (Gustin, 2019).

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama dengan diperkenalkannya kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Meski begitu, tantangan utama yang tetap ada adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tantangan ini memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang lebih baik (Jalal, Supriatna, & Hilmi, 2009). Seiring meningkatnya globalisasi, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan baru untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan sosial serta ekonomi saat ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang evolusi sistem pendidikan di Indonesia sangat penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan, tetapi juga untuk memahami bagaimana pendidikan berperan dalam pembentukan identitas nasional dan mendukung pembangunan bangsa (Amrozi, 2019).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan?
2. Apa saja faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi perubahan sistem pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana peran pendidikan dalam pembentukan karakter bangsa dan identitas nasional Indonesia?
4. Apa tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk menganalisis evolusi sistem pendidikan di Indonesia, dari masa kolonial hingga masa pasca-reformasi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, baik dari segi sosial, politik, maupun budaya.
3. Untuk mengevaluasi peran pendidikan dalam membentuk karakter bangsa dan identitas nasional Indonesia, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara.
4. Untuk memberikan rekomendasi tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Kajian Sejarah Pendidikan di Indonesia

Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya alat untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Pendidikan di Indonesia mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, mulai dari masa kolonial hingga pasca-reformasi. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas berbagai penelitian yang mengkaji sejarah pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.

Pendidikan di Masa Kolonial

Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda didesain untuk mendukung kekuasaan kolonial dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam administrasi dan produksi untuk kepentingan kolonial. Pendidikan yang diterapkan pada saat itu sangat terbatas dan bersifat diskriminatif, hanya diperuntukkan bagi golongan elit Eropa dan sebagian kecil pribumi yang dianggap berpendidikan. Hal ini tercermin dalam dualisme pendidikan yang diterapkan, dengan adanya sekolah untuk orang Eropa yang mengajarkan kurikulum Barat, sementara bagi pribumi, pendidikan yang tersedia lebih bersifat teknis dan terbatas pada keterampilan yang mendukung ekonomi kolonial (Sadovnik, 2007). Buchori (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meskipun pendidikan pada masa kolonial sangat terbatas, ada upaya dari tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mencoba memperkenalkan konsep pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal melalui Taman Siswa pada tahun 1922. Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mencerminkan identitas dan budaya bangsa, bukan hanya meniru sistem pendidikan Barat. Gerakan ini menjadi salah satu landasan utama dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan (Buchori, 2007).

Pendidikan di Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Pemerintah Indonesia berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Dalam kajian oleh Suryadarma et al. (2006), disebutkan bahwa pendidikan pasca-kemerdekaan berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan melalui pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, meskipun masih banyak keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur pendidikan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan tingkat literasi dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif (Suryadarma et al., 2006). Namun, meskipun ada upaya untuk meratakan pendidikan, tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan antara daerah

perkotaan dan pedesaan, serta antara Jawa dan luar Jawa. Djojonegoro (1996) dalam karyanya menyebutkan bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia sangat kentara pada periode ini, dengan akses pendidikan yang terbatas di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat ideologi nasionalisme yang tengah dibangun pasca-kemerdekaan (Djojonegoro, 1996).

Pendidikan pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah. Chang et al. (2014) dalam kajian mereka tentang reformasi pendidikan di Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia. Namun, pendidikan pada masa ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang bersifat sentralistik dan otoriter, dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan pembangunan ekonomi (Chang et al., 2014). Salah satu dampak dari kebijakan pendidikan Orde Baru adalah munculnya ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pusat, yang menyebabkan daerah-daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan lokal mereka (Suryahadi et al., 2006).

Pendidikan pada Masa Reformasi dan Pasca-Reformasi

Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pendidikan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal (Jalal et al., 2009). Meskipun kebijakan desentralisasi memberi peluang bagi daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu kajian yang relevan dalam konteks ini dilakukan oleh Suratno (2014), yang menunjukkan bahwa meskipun pendidikan telah mengalami desentralisasi, kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Suratno mencatat bahwa banyak daerah masih menghadapi masalah besar terkait infrastruktur pendidikan, kualitas pengajaran, serta ketimpangan dalam akses pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi memberikan peluang untuk memperbaiki pendidikan, kebijakan pendidikan yang lebih terintegrasi dan adaptif tetap diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Masyarakat

Dampak dari kebijakan pendidikan di Indonesia sangat signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sahlberg (2011) mencatat bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas berperan besar dalam meningkatkan mobilitas sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang merata dan berkualitas dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesempatan kerja, terutama di daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis.

Teori dan Kerangka Konseptual

1. Teori Perubahan Sosial. Teori perubahan sosial digunakan untuk menggambarkan bagaimana pendidikan Indonesia telah berkembang sepanjang sejarah, mulai dari masa

kolonial hingga pasca-reformasi. Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang membentuk struktur sosial Indonesia. Teori ini memungkinkan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial, pola-pola interaksi dalam masyarakat, serta respons terhadap perubahan sosial yang lebih besar (Sari, 2019).

2. Teori Pendidikan Kritis. Teori pendidikan kritis mengutamakan pembebasan dan pemberdayaan individu melalui pendidikan. Ini relevan dengan upaya pendidikan Indonesia untuk menanamkan kesadaran sosial dan mendorong siswa untuk mengkritisi struktur kekuasaan dan ketidakadilan. Pendidikan yang berbasis pada teori ini dapat membantu mendorong perubahan struktural, baik dalam sistem pendidikan maupun dalam masyarakat secara keseluruhan (Rosser & Fahmi, 2016).
3. Teori Desentralisasi Pendidikan. Desentralisasi pendidikan di Indonesia, terutama sejak reformasi 1998, telah memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Namun, desentralisasi juga menimbulkan tantangan besar, seperti ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas dan akses pendidikan. Teori ini menganalisis bagaimana desentralisasi dapat memengaruhi efektivitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Kristiansen & Pratikno, 2006; Toi, 2010).
4. Teori Ekonomi Politik Pendidikan. Teori ini melihat bagaimana keputusan politik dan ekonomi berperan dalam membentuk kebijakan pendidikan. Pendidikan seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu, yang dapat memperkuat atau memperburuk ketidaksetaraan. Di Indonesia, desentralisasi pendidikan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional yang memengaruhi distribusi sumber daya dan kualitas pendidikan (Simatupang, 2011; Al-Samarrai & Cerdán-Infantes, 2013).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam evolusi sistem pendidikan di Indonesia serta menggali dampak sosial dan politik dari perubahan kebijakan pendidikan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih berfokus pada pengukuran numerik atau analisis statistik, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan, baik dari segi kebijakan maupun dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Peneliti dapat menganalisis data yang bersifat naratif dan deskriptif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan dikembangkan, diterapkan, dan direspons oleh masyarakat (Suryadi, 2021).

Metode yang Digunakan: Studi Literatur

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur ini akan mencakup ulasan terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, serta dokumen historis yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Peneliti akan mengidentifikasi berbagai peristiwa penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, serta memetakan perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi sejak masa kolonial hingga pasca-reformasi. Studi literatur ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk melihat bagaimana pendidikan berperan dalam pembentukan identitas nasional (Syahrul & Wardana, 2018).

Metode Analisis: Analisis Kebijakan Pendidikan

Selain studi literatur, penelitian ini juga akan menggunakan analisis kebijakan pendidikan untuk mengkaji perubahan dan dampak kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Proses analisis kebijakan ini berfokus pada kajian terhadap dokumen kebijakan, undang-undang pendidikan, serta laporan pemerintah yang terkait dengan sektor pendidikan. Peneliti akan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah, serta menganalisis latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang mendorong perubahan kebijakan pendidikan tersebut. Evaluasi dampak kebijakan akan mencakup perbandingan antara tujuan kebijakan dan hasil yang tercapai, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (Yudhistira, 2021).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber data sekunder, termasuk dokumen kebijakan pendidikan, artikel jurnal, dan buku yang membahas sejarah pendidikan di Indonesia. Selain itu, data sekunder juga akan mencakup laporan pemerintah dan dokumen sejarah yang mencatat perkembangan pendidikan dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan dan pasca-reformasi. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan memverifikasi sumber-sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia (Rupinus, Arifin, & Akadira, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Masa Kolonial (Hindia Belanda)

Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda, yang berlangsung dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, didasarkan pada kebijakan yang sangat diskriminatif dan terbatas. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh penjajah Belanda lebih bersifat segregatif, dengan tujuan utama untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan memfasilitasi kebutuhan administrasi serta ekonomi kolonial. Pendidikan pada masa ini sangat terbatas, hanya tersedia untuk golongan tertentu, yaitu orang Eropa, golongan bangsawan pribumi, dan sebagian kecil pribumi yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja di sektor-sektor administratif atau teknis yang mendukung kekuasaan kolonial (Rahmawati, Kaswati, & Lestari, 2023).

Sistem Pendidikan yang Diskriminatif dan Terbatas

Pada masa kolonial, pendidikan yang diberikan kepada orang Eropa sangat berbeda dengan pendidikan yang diterima oleh orang pribumi. Pendidikan untuk orang Eropa mengadopsi sistem pendidikan Barat yang mengajarkan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi kolonial. Sekolah-sekolah untuk orang Eropa didirikan di kota-kota besar, dengan bahasa pengantar utama adalah bahasa Belanda, dan kurikulumnya berfokus pada mata pelajaran yang terkait dengan hukum, politik, dan ekonomi. Sementara itu, pendidikan untuk pribumi sangat terbatas dan terpisah, hanya mencakup keterampilan dasar untuk mendukung ekonomi kolonial, seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan (Sadovnik, 2007).

Pengenalan Sistem Pendidikan Barat dan Dampaknya

Pengenalan sistem pendidikan Barat membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial Indonesia. Sistem ini memperkenalkan konsep-konsep baru seperti

sekularisme, rasionalisme, dan individualisme, yang berbeda dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia. Namun, dampak pengenalan pendidikan Barat sangat selektif, hanya dirasakan oleh segmen-segmen tertentu dari masyarakat Indonesia. Pendidikan ini tidak dirancang untuk mempersiapkan rakyat pribumi memimpin bangsa mereka sendiri, tetapi lebih berfungsi untuk mempertahankan dominasi kolonial dan menciptakan lapisan elit pribumi yang loyal kepada Belanda (Buchori, 2007).

Tokoh-Tokoh Penting dalam Pendidikan Kolonial: Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa

Salah satu tokoh pendidikan yang berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara. Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan pendidikan inklusif bagi semua kalangan, terutama anak-anak pribumi yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem pendidikan kolonial. Dewantara mengedepankan pendidikan berbasis kebudayaan lokal dan pembentukan karakter bangsa, yang bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan mencetak generasi yang memiliki kesadaran akan kemerdekaan Indonesia. Konsep pendidikan Dewantara menjadi dasar penting dalam pembentukan sistem pendidikan Indonesia pasca-kemerdekaan (Rahmawati, Kaswati, & Lestari, 2023).

Pendidikan di Masa Kemerdekaan (1945-1965)

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Salah satu tujuan utama dari pemerintah yang baru terbentuk adalah mengembangkan sistem pendidikan yang dapat memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat Indonesia dan mendukung pembangunan sosial, ekonomi, serta kebangsaan. Pendidikan dipandang sebagai kunci untuk memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang terdidik, mandiri, dan berdaya saing. Namun, perjalanan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di Indonesia tidaklah mudah, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan (Suryadi & Widodo, 2018).

Perubahan dalam Sistem Pendidikan Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan pengorganisasian dan pemerataan pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang diterapkan masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan masa kolonial yang sangat terbatas dan tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah baru Indonesia berusaha melakukan reformasi dan perubahan dalam sistem pendidikan untuk meratakan akses pendidikan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Salah satu perubahan penting dalam pendidikan setelah kemerdekaan adalah penekanan pada pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa Indonesia (Syahrul & Wardana, 2018).

Kebijakan Pendidikan pada Masa Awal Kemerdekaan

Pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan berusaha untuk meratakan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu kebijakan penting adalah usaha memperluas pendidikan dasar. Berdasarkan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada masa ini, banyak kebijakan yang terbatas oleh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kebijakan lebih banyak berfokus pada pembangunan pendidikan dasar dan menengah di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai,

seperti di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, sementara di daerah lain, akses pendidikan masih sangat terbatas (Astuti & Setiawan, 2013).

Tantangan yang Dihadapi Negara Baru dalam Pengembangan Pendidikan

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan setelah kemerdekaan adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah luas dan tersebar, menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh daerah. Selain itu, Indonesia kekurangan tenaga pendidik yang terlatih dan berkompeten. Pada masa awal kemerdekaan, jumlah guru terlatih masih sangat terbatas. Keterbatasan dana untuk membangun sekolah dan menggaji guru juga menjadi masalah besar. Tantangan lainnya adalah keragaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia, yang memerlukan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut (Syahrul & Wardana, 2018).

Pengaruh dari Konstitusi dan Undang-Undang yang Mendasari Pendidikan Nasional

Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Selain itu, pada 1950-an, Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 disahkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada pemerataan pendidikan dan pembentukan lembaga pendidikan yang lebih terstruktur. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1954 untuk mengorganisir pendidikan di Indonesia (Yuningsih, 2019).

Pendidikan pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998) mengalami transformasi besar yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas politik negara. Pendidikan pada periode ini menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut, dengan berbagai kebijakan yang difokuskan pada ekspansi pendidikan, pemerataan akses, serta peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, masa Orde Baru juga menghadapi sejumlah tantangan besar terkait dengan kualitas pendidikan dan ketidakmerataan pendidikan antar daerah.

Perubahan Besar dalam Sistem Pendidikan: Kebijakan Wajib Belajar dan Ekspansi Pendidikan

Salah satu perubahan terbesar dalam sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru adalah pengenalan kebijakan wajib belajar yang dimulai pada awal 1970-an. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Wajib Belajar 6 Tahun (program pendidikan dasar enam tahun), yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang sebelumnya sangat terbatas dalam hal akses pendidikan. Pada tahun 1984, kebijakan ini diperluas menjadi wajib belajar sembilan tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga tingkat menengah pertama (SMP) untuk menurunkan tingkat buta huruf yang tinggi pada waktu itu. Kebijakan ini membawa dampak positif dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah luar Jawa (James, King, & Suryadi, 1996).

Pendekatan Pemerintah Orde Baru terhadap Pendidikan sebagai Alat untuk Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi

Pemerintah Orde Baru melihat pendidikan sebagai alat utama untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan ekonomi. Pendidikan pada masa ini tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang patuh, teratur, dan mendukung agenda politik pemerintah. Salah satu ciri khas dari pendidikan pada masa Orde Baru adalah pengendalian ideologi melalui kurikulum yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan patriotisme. Pendidikan pada masa ini juga menekankan disiplin, kerja keras, dan keseragaman, yang mencerminkan pandangan pemerintah tentang pentingnya stabilitas sosial. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pendidikan teknis dan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung industrialisasi dan modernisasi ekonomi negara (Hansen, Saleh, Flinn, & Hotchkiss, 1989).

Peningkatan Sekolah dan Universitas, serta Tantangan Terkait Kualitas Pendidikan dan Ketidakmerataan

Selama masa Orde Baru, jumlah sekolah dan universitas meningkat pesat di seluruh Indonesia. Pemerintah mendirikan ribuan sekolah baru dan universitas negeri untuk meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah. Namun, meskipun terjadi ekspansi yang besar dalam jumlah sekolah, kualitas pendidikan tetap menjadi tantangan besar. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang signifikan. Di banyak daerah terpencil, terutama di luar Pulau Jawa, sekolah-sekolah sering kekurangan guru terlatih dan fasilitas yang memadai. Meskipun kebijakan wajib belajar berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan di beberapa daerah tetap tidak sebanding dengan yang ada di kota-kota besar (Nielsen, 1998).

Pendidikan pada Masa Reformasi dan Pasca-Reformasi (1998-sekarang)

Sejak kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sektor pendidikan. Reformasi ini membawa angin segar bagi kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan yang sebelumnya sangat terpusat dan otoriter. Perubahan yang paling signifikan adalah desentralisasi pendidikan, yang memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan serta pengembangan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan global dan sosial. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, pendidikan di Indonesia pada masa reformasi dan pasca-reformasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan modern, seperti kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta dampak globalisasi dan teknologi terhadap sistem pendidikan (Suryadi, Rahmawati, Hayat, & Suprananto, 2019).

Perubahan Kebijakan Pendidikan setelah Kejatuhan Orde Baru

Setelah Orde Baru tumbang pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan peningkatan transparansi dan desentralisasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sebelumnya, kebijakan pendidikan sangat terpusat, dengan pemerintah pusat yang memiliki kendali penuh atas kebijakan dan kurikulum pendidikan. Namun, setelah reformasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, namun juga menimbulkan tantangan terkait standarisasi dan kesenjangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Rosyada & Sayuti, 2017).

Pengenalan Kurikulum Baru dan Perubahan dalam Pengelolaan Pendidikan

Salah satu kebijakan penting pada masa reformasi adalah perubahan kurikulum yang bertujuan untuk menjawab tantangan baru dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2006, Indonesia memperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang memberi kebebasan lebih kepada sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah mereka. KTSP merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Kurikulum 2013 (K13) yang mengedepankan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kreativitas. K13 juga menekankan pendekatan tematik integratif, yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa di era globalisasi (Ilma & Pratama, 2015).

Tantangan Modern dalam Pendidikan di Indonesia

Meski banyak kemajuan yang dicapai, pendidikan Indonesia pada masa reformasi dan pasca-reformasi masih dihadapkan pada tantangan modern yang cukup besar, di antaranya adalah kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta dampak teknologi dan globalisasi terhadap pendidikan. Ketidakmerataan akses pendidikan masih menjadi masalah utama, dengan daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas, tenaga pendidik terlatih, serta keterbatasan dalam mengakses teknologi yang semakin penting dalam pendidikan modern. Selain itu, meskipun teknologi digital dan pembelajaran daring menjadi peluang, kesenjangan digital antara daerah kaya dan miskin memperburuk ketidaksetaraan pendidikan. Globalisasi juga membawa dampak pada standar pendidikan internasional, yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan kurikulum agar dapat bersaing di pasar global. Pendidikan di Indonesia kini menghadapi tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap untuk pasar kerja lokal tetapi juga mampu bersaing secara global (Bate, 2018).

KESIMPULAN

Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Pada masa penjajahan, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hanya golongan tertentu, seperti orang-orang Eropa dan bangsawan pribumi, yang mendapatkan akses pendidikan formal, sementara mayoritas rakyat pribumi tidak diberi kesempatan yang sama. Di sisi lain, meskipun pendidikan pada masa kolonial terbelenggu oleh kebijakan politik yang menindas, beberapa tokoh penting seperti Ki Hajar Dewantara berusaha melawan ketidakadilan ini dengan memperkenalkan konsep pendidikan yang lebih inklusif, yang berbasis pada budaya lokal dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat luas. Melalui pendirian Taman Siswa, Dewantara mencoba menyediakan akses pendidikan bagi semua kalangan, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka menghadapi tantangan besar dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pemerataan akses tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa. Pendidikan menjadi salah satu instrumen utama untuk membangun identitas nasional dan karakter bangsa yang kuat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan di berbagai daerah, meskipun masih banyak kendala yang harus dihadapi, seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah urban dan pedesaan. Selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi juga menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan, yang mengharuskan sistem pendidikan Indonesia untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Saran

Dalam rangka memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan Indonesia, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah terpencil yang masih mengalami ketimpangan dalam hal akses pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang memadai harus dibangun di daerah-daerah ini, termasuk penyediaan sekolah yang layak, fasilitas yang cukup, serta pelatihan guru-guru lokal untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses teknologi yang memadai, seperti internet dan perangkat pembelajaran digital, agar para siswa di daerah terpencil dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas. Kedua, peningkatan kualitas pengajaran harus menjadi prioritas utama. Program pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru di seluruh Indonesia harus lebih intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek pedagogi dasar, tetapi juga penggunaan teknologi dalam pendidikan, serta pembaruan kurikulum untuk menyelaraskan materi ajar dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, guru harus dilengkapi dengan keterampilan untuk memanfaatkan platform pembelajaran online dan perangkat teknologi lainnya, agar siswa dapat belajar secara lebih interaktif dan efisien. Selanjutnya, pembaruan kurikulum pendidikan Indonesia sangat diperlukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan global. Kurikulum yang ada saat ini perlu berfokus pada pengembangan kompetensi dasar siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa harus tetap menjadi inti dari pendidikan Indonesia. Kurikulum juga harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan memberikan ruang untuk inovasi dalam metode pembelajaran. Terakhir, pemberdayaan pendidikan berbasis teknologi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, seperti platform e-learning, aplikasi pembelajaran berbasis digital, dan video conference untuk pembelajaran jarak jauh, harus diperluas. Pemerintah harus mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih fleksibel dan terjangkau, baik di sekolah-sekolah formal maupun dalam konteks pendidikan non-formal. Hal ini akan memungkinkan siswa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Melalui langkah-langkah ini, sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan global. Pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran akan mendukung pencapaian visi Indonesia yang maju dan berdaya saing di kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Samarrai, S., & Cerdán-Infantes, P. (2013). Where did all the money go? Financing basic education in Indonesia. *World Bank*, 109-138. <https://doi.org/10.1355/9789814459877-011>
- Amrozi, S. R. (2019). Formulasi kepemimpinan pendidikan (perspektif teori kepemimpinan dalam doktrin Al-Qur'an). *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.35719/jieman.v1i1.9>
- Astuti, Y., & Setiawan, B. (2013). Pengembangan lembar kerja siswa berbasis pendekatan inkuiri terbimbing dalam pembelajaran kooperatif. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 2(1), 122-698. <https://doi.org/10.15294/JPII.V2I1.2515>
- Bate, N. (2018). Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran penjasorkes ditinjau dari standar proses pembelajaran di SMP Kecamatan Golewa. *IMEDTECH (Instructional Media, Design and Technology)*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2595670>
- Buchori, S. (2007). Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Upaya Pendidikan yang Lebih Inklusif. *Sejarah Publik dan Pendidikan Sejarah Bagi Masyarakat*.

https://consensus.app/papers/sejarah-publik-pendidikan-sejarah-bagi-masyarakat-amboro/70265eb10ba45e68b548d3bcc81fd3bc/?utm_source=chatgpt

- Chang, W., et al. (2014). Reformasi Pendidikan di Indonesia: Kebijakan Wajib Belajar dan Dampaknya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>
- Gustin, G. (2019). Analisis kebijakan populis dan peta mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 2(1), 984. <https://doi.org/10.32923/KJMP.V2I1.984>
- Hansen, D. O., Saleh, A., Flinn, W. L., & Hotchkiss, L. (1989). Determinants of access to higher education in Indonesia. *Comparative Education Review*, 33(3), 317-333. <https://doi.org/10.1086/446861>
- Ilma, Z., & Pratama, R. K. (2015). Transformation in Indonesian language curriculum: Pros and cons between KTSP 2006 and Curriculum 2013 in Indonesia. *International Conference on Education and Humanities*. <https://doi.org/10.15242/icehm.ed0315007>
- Jalal, F., Supriatna, S., & Hilmi, M. (2009). Desentralisasi pendidikan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.29303/JIPP.V5I1.111>
- James, E., King, E., & Suryadi, A. (1996). Finance, management, and costs of public and private schools in Indonesia. *Economics of Education Review*, 15(4), 387-398. [https://doi.org/10.1016/S0272-7757\(96\)00035-0](https://doi.org/10.1016/S0272-7757(96)00035-0)
- Kurniawan, M. D., & Suwirta, A. (2016). Ideologisasi konsep reformasi dalam historiografi buku teks pelajaran sejarah di sekolah. *MIMBAR Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1(1), 1753. <https://doi.org/10.17509/MIMBARDIK.V1I1.1753>
- Nielsen, H. (1998). Reforms to teacher education in Indonesia: Does more mean better? *Asia Pacific Journal of Education*, 18(1), 9-25. <https://doi.org/10.1080/0218879980180203>
- Rahmawati, A., Kaswati, A., & Lestari, S. (2023). Pendidikan di Sekolah Taman Siswa (1922) dan Relevansinya dengan Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar (2019). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.8192>
- Rosyada, D., & Sayuti, W. (2017). Problematika penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di madrasah. *Edukasi*. <https://doi.org/10.32729/EDUKASI.V5I1.271>
- Suryadi, A. N. (2021). Tantangan pemenuhan hak-hak mahasiswa dan penguatan kompetensi kewarganegaraan melalui kebijakan kampus merdeka. *Jurnal Pendidikan Kebangsaan*, 6(1), 46-56. <https://doi.org/10.24269/JPK.V6.N1.2021.PP46-56>
- Suryadi, A., & Widodo, W. (2018). Pendidikan dan reformasi pasca kemerdekaan: Transformasi kebijakan pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.31942/MGS.V12I1.4290>
- Suryahadi, A., Sumarto, S., & Suharso, W. (2006). Pendidikan dan kebijakan wajib belajar di Indonesia: Analisis kebijakan dan dampaknya. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Negara*, 1(2), 40866. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>
- Syahrul, S., & Wardana, A. (2018). Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. <https://doi.org/10.21831/HSJPI.V4I2.10388>
- Yudhistira, M. A. D. (2021). Implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17201>
- Yuningsih, Y. (2019). Pendidikan kecakapan abad ke-21 untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.17509/jppd.v6i1.21526>